

A strategy to defend the independence of Republic of Indonesia year 1948-1949

PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA (PDRI) : Suatu Strategi Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1948-1949

Rio Yenvan Permana
 SMA MUHAMMADIYAH 2 GENTENG
 rioyenvan17@gmail.com

(*) Corresponding Author

How to Cite: Rio (2020). Title of article. Santhet, 4(2),

doi: 10.36526/js.v3i2.

Received : 15 september 2019
 Revised : 5 Oktober 2020
 Accepted : 25 Oktober 2020

Keywords:

*Emergency Government;
 The Republic;
 Indonesia, the strategy;
 Struggle;*

Abstract

One of the strategies of struggle to defend the independence of Indonesia is by forming an emergency Government of the Republic of Indonesia (PDRI). PDRI is a strategy of struggle by means of a transfer of power made by the Government of Indonesia Sjafruddin Prawiranegara to run the Government. The strategy transfer of power with the creation of PDRI is a step that is right for the Government of the Republic of Indonesia. This is because, with the fall of Yogyakarta and the capture of the leaders of the Republic of Indonesia. The method used in this study is the historical method consists of Heuristics, Criticism, Interpretation, and Historiography. The formation of the PDRI in 1948. Background of the formation of the PDRI in 1948. PDRI tactics in maintaining the independence of the Republic of Indonesia in 1948-1949. return of the mandate

This is an open access article under the CC-BY-SA license.



PENDAHULUAN

Perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai peranan sentral dalam pemerintahan yaitu masa perang kemerdekaan. Pada masa itu tercatat beberapa peristiwa penting yang menentukan pemerintahan Republik Indonesia. Berbagai penyerangan, peperangan dan perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan terjadi karena Belanda ingin mengembalikan kekuasaan pemerintah Hindia-Belanda. Salah satu strategi perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan adalah dengan membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (lebih lanjut ditulis PDRI). PDRI merupakan suatu strategi perjuangan dengan cara pengalihan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada Sjafruddin Prawiranegara untuk menjalankan pemerintahan. Hal ini karena pemerintah Indonesia pada masa

itu tidak dapat menjalankan fungsi pemerintahan, disebabkan adanya agresi militer Belanda II yang berhasil menangkap Soekarno dan Hatta selaku pimpinan pemerintahan.

Agresi militer yang dilakukan oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 terhadap Yogyakarta diawali dengan menerjunkan pasukannya di pangkalan udara Maguwo. Serangan itu dimaksudkan untuk menghapus peta ketatanegaraan Republik Indonesia (Heijboer, 1998:140-142). Hal ini berarti Belanda telah melanggar persetujuan Renville yang ditandatangani pada tanggal 19 Januari 1948 antara pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda (Agung, 1983: 67).

Adams (2011:306) menjelaskan dalam suasana pertempuran pada tanggal 19 Desember 1948 para petinggi RI masih sempat untuk mengadakan sidang kabinet. Sidang kabinet diadakan secara tergesa-gesa dan

berhasil mengambil keputusan penting, yaitu dua buah telegram yang berisikan penyerahan mandat kepada pemimpin di luar Jawa. Telegram pertama ditujukan kepada Sjafruddin Prawiranegara di Bukittinggi untuk membentuk pemerintahan darurat dan yang ke dua kepada perwakilan Indonesia di India. Telegram yang kedua mengintruksikan kepada perwakilan Indonesia di India agar melakukan hubungan dengan pemerintah darurat di Sumatra. Dalam sidang itu juga menetapkan bahwa Presiden dan wakil Presiden untuk tidak meninggalkan Yogyakarta agar hubungan diplomatik dapat diadakan (Pour, 2009:68).

Telegram yang dikirim kepada Sjafruddin Prawiranegara sebenarnya tidak sampai di Bukittinggi karena Belanda telah menguasai jalur komunikasi. Namun, strategi pengalihan pemerintahan memang sudah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, walaupun tidak menerima mandat dari presiden, pada tanggal 22 Desember 1948 Sjafruddin Prawiranegara membentuk PDRI. Hal ini terjadi karena Sjafruddin Prawiranegara sebelumnya memang telah dipersiapkan oleh Moh. Hatta menjadi perdana menteri sementara apabila terjadi serangan dari pasukan Belanda (Hatta, 2011:185). Setelah PDRI dibentuk dengan bantuan pemancar radio milik Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) pembentukan PDRI segera diumumkan ke seluruh tanah air dan ke luar negeri. Upaya ini dilakukan untuk menunjukkan eksistensi Republik Indonesia (Noor, 1999:78).

Strategi pengalihan kekuasaan dengan dibentuknya PDRI merupakan langkah yang tepat bagi pemerintah Republik Indonesia. Hal ini karena, dengan jatuhnya Yogyakarta dan tertangkapnya Pemimpin-pemimpin Republik Indonesia, Belanda akan mempersoalkan kedudukan dan legalitas perwakilan Republik Indonesia di forum Internasional PBB. Dengan dibentuknya PDRI hal tersebut ternyata tidak terjadi, mengingat Belanda tidak memperhitungkan reaksi internasional. Padahal di berbagai forum sidang PBB, Konferensi New Delhi, appeal Liga Arab diadakan pembicaraan mengenai tindakan agresi militer yang dilakukan Belanda terhadap Republik Indonesia. Akhirnya muncul resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949 dan atas bantuan UNCI pada tanggal 7 Mei 1949 perundingan guna mengatasi persengketaan antara pemerintah Belanda dengan Pemerintah Republik Indonesia dapat dilakukan yang dikenal dengan Van Royen-Roem Statements (Roem, 1977 : 43).

Dalam kesepakatan Roem-Royen ternyata PDRI tidak dilibatkan, melainkan dilakukan oleh Sukarno dan Moh. Hatta dengan menunjuk Moh. Roem untuk mewakili Republik Indonesia dalam perundingan dengan Belanda. Perundingan antara pemerintah Belanda dan Republik Indonesia menyepakati untuk mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Pada tanggal 13 Juli 1949 dalam sidang kabinet yang diadakan di Yogyakarta, demi persatuan bangsa dan agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan mandat kepada presiden Republik Indonesia. Dengan adanya pengembalian mandat ini maka berakhirilah pemerintahan PDRI yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

PDRI merupakan strategi perjuangan yang sentral dalam memertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini karena merupakan perpanjangan dari pemerintah Indonesia yang pada masa itu tidak dapat menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya. Walaupun demikian tidak berarti menampilkan perjuangan yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada masa revolusi perjuangan mempertahankan kemerdekaan terjadi di daerah-daerah, baik melalui jalan diplomasi ataupun bergerilya, karena dalam setiap tahapan sejarah memiliki peran dan arti penting tersendiri bagi masyarakat pendukungnya. Apabila dilihat dari strategi perjuangan, pembentukan PDRI memang mempunyai fungsi dan peranan yang sangat besar dalam persatuan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan.

Sebenarnya pada penelitian-penelitian terdahulu Penjelasan tentang PDRI sudah banyak ditulis, tetapi hanya membahas mengenai pembentukan dan jalannya Pemerintahannya saja. Pembahasan PDRI sebagai suatu strategi dalam mempertahankan kemerdekaan dan menunjukkan eksistensi Republik Indonesia baik di dunia internasional maupun kepada Belanda terabaikan. Selain itu dalam penelitian-penelitian terdahulu banyak membahas mengenai pembentukan PDRI yang dilakukan oleh Sjafruddin Prawiranegara, sehingga mengenai realitas obyektif pembentukan PDRI terabaikan.

Berdasarkan ulasan di atas, peneliti berpendapat tema mengenai PDRI masih menyimpan banyak persoalan untuk diungkap, seperti realitas obyektif pembentukan PDRI, taktik PDRI dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia juga mengenai pengembalian mandat yang dilakukan Sjafruddin

Prawiranegara kepada presiden Republik Indonesia menjadi pembahasan yang menarik untuk dikembangkan lebih lanjut. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik mengkaji lebih dalam mengenai strategi bangsa Indonesia membentuk PDRI untuk mempertahankan kemerdekaan. Keunikan permasalahan ini terlihat dalam pembentukan PDRI terjadi di tengah serangan agresi militer Belanda II. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk memilih judul "Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) : Suatu Strategi Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1948-1949".

METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan politik yang menekankan konsep kekuasaan. Dengan pendekatan tersebut peneliti dapat melihat mengenai strategi pembentukan PDRI yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Republik Indonesia. Robson (dalam Surbakti, 1992:50). Menyatakan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berfikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi, kekuasaan juga sebagai interaksi antara pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi atau yang satu mempengaruhi yang lain mematuhi. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori Konflik. Dalam masyarakat selalu terdapat konflik antara kepentingan dari mereka yang memiliki kekuasaan otoritatif yang berupa kepentingan untuk memelihara atau bahkan mengukuhkan status-quo dari pola hubungan-hubungan kekuasaan yang ada. Apabila kepentingan untuk merubah status-quo disertai tindak kekerasan akan menyebabkan perubahan struktur yang tiba-tiba.

PEMBAHASAN

a. Latar Belakang Terbentuknya PDRI Pada tahun 1948

Usaha penyelesaian persengketaan antara Indonesia dengan Belanda telah diusahakan dalam serangkaian perundingan, dimulai dari perundingan di Linggarjati sampai perundingan di kapal Renville. Namun langkah perundingan yang dijalankan kedua belah pihak ternyata belum juga dicapai perdamaian, bahkan terpaksa diperlukan campur tangan badan internasional, yaitu Dewan Keamanan PBB.

Belanda pada saat menjalankan politik diplomasinya juga disertai dengan tindakan militer. Perundingan antara delegasi Republik Indonesia dan delegasi Belanda yang dibantu oleh Komisi Tiga Negara (KTN) yang membicarakan pelaksanaan Persetujuan Renville menemui jalan buntu. Hal ini dikarenakan Perundingan-perundingan pasca Renville, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Moh Roem memperjuangkan penghentian blokade, pengadaan plebisit, dan pengakuan kedaulatan. Perjanjian Renville ini ternyata tidak bisa menghentikan permusuhan antara pihak Republik Indonesia dengan pihak Belanda. Perbedaan terus berkecamuk, perbedaan pendapat ini berkisar pada masalah pelaksanaan perundingan Belanda memprotes kebijakan Republik Indonesia yang mengadakan perjanjian persahabatan dengan Mesir, India.

Perundingan Republik Indonesia dengan Belanda yang membahas pelaksanaan perundingan Renville menemui jalan buntu. Hal ini dapat dilihat dari perundingan-perundingan yang dilaksanakan tidak mendapat kemajuan. Perselisihan dalam pelaksanaan Renville mencapai puncaknya pada tanggal 19 Desember 1948. Tindakan militer Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, menyerang dan menduduki ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Tujuan Belanda mengadakan agresi yaitu ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia telah hancur, dengan ditahannya Presiden, Wakil Presiden dan beberapa pejabat tinggi lainnya oleh Belanda.

Selain menyerang Yogyakarta Agresi militer Belanda II juga menyerang Bukittinggi. Hal ini dikarenakan Bukittinggi juga merupakan salah satu benteng pertahanan Republik Indonesia yang kuat. Bukittinggi yang terus menerus mendapat serangan dari pasukan Belanda, maka pada tanggal 21 Desember 1948 Sjafruddin Prawiranegara, T.M. Hasan beserta pejabat tinggi lainnya pergi ke Halaban yang terletak 15 km sebelah selatan Payakumbuh untuk menghindari penangkapan oleh Belanda. Halaban dipilih sebagai tempat pertahanan dan persembunyian dikarenakan halaban terletak di kompleks perkebunan teh di kaki Gunung Sago yang menyulitkan pasukan Belanda mencapai tempat tersebut. Setelah Sjafruddin Prawiranegara memperoleh berita mengenai keadaan Bukittinggi dari Residen Sumatera Tengah S.M. Rasjid, maka pembicaraan dipusatkan kepada masalah pembentukan PDRI. Selain itu juga tersiar berita mengenai Yogyakarta yang telah dikuasai oleh Belanda yang menahan

Presiden dan wakil Presiden, maka segera diadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut disetujui bersama untuk membentuk PDRI.

Pembentukan PDRI merupakan suatu strategi dari para founding father Republik Indonesia dalam usahanya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang ada mengenai rencana pembentukan PDRI yang dimulai dari pembicaraan dalam Dewan Siasat Militer maupun dari kesaksian Moh. Hatta. Sebelum terjadi agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Moh. Hatta telah mempersiapkan Sjafruddin Prawiranegara sebagai perdana menteri sementara. Sjafruddin Prawiranegara dipersiapkan menjadi Perdana menteri sementara oleh Moh. Hatta bukan tanpa alasan. Sjafriddin Prawiranegara dipilih karena secara latar belakang Agama mempunyai dasar yang kuat untuk menyatukan perjuangan rakyat Sumatera yang sebagian besar merupakan pemeluk agama islam untuk melawan Belanda apabila pemerintahan darurat dibentuk. Sjafriddin Prawiranegara merupakan keturunan kesultanan Banten yang diperolehnya dari ibu, sedangkan sang ayah merupakan bangsawan dari Minangkabau yaitu Soetan Alamintan yang ikut mengobarkan perang Padri (1821-1937) (Rosidi, 1986:2). Selain itu Sjafruddin Prawiranegara merupakan seorang ahli Hukum yang bergelar Meester in de Rechten lulusan RHS (Rechts Hoge School) yang merupakan sekolah tinggi hukum yang berada di Jakarta. Oleh karena itu Sjafruddin dipilih menjadi perdana menteri sementara karena memang secara keahlian personal dapat menjalankan pemerintahan darurat, serta mengetahui tentang ketatanegaraan yang bersifat darurat juga mengenai hukum-hukum berdirinya sebuah pemerintahan darurat.

b. Realitas Objektif Terbentuknya PDRI

Hubungan Republik Indonesia dengan Belanda semakin memburuk pasca perundingan Renville. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak saling silang pendapat mengenai pelaksanaan perundingan Renville, seperti penghentian blokade yang dilakukan pasukan Belanda terhadap daerah-daerah Republik Indonesia, masalah plebisit mengenai pemerintahan peralihan dan pembentukan Uni Indonesia Belanda, serta pengakuan kedaulatan. Dengan macetnya pelaksanaan perundingan Renville serta terdapat petunjuk bahwa Belanda akan

melancarkan aksi militer yang kedua. Menghadapi situasi yang demikian para pemimpin pemerintahan Republik Indonesia mengadakan pertemuan di istana presiden yang berada di Yogyakarta untuk membahas siasat apabila Belanda benar-benar melancarkan agresi militernya. Dalam pertemuan itu dihadiri oleh Presiden Sukarno, Wakil presiden/perdana Menteri Moh. Hatta, Panglim Besar angkatan Perang Jendral Sudirman, Letnan Jendral Oerip soemoharjo beserta staf, Komodor Udara Suryadarma, Kolonel Hidayat dan Kolonel Simatupang yang dikenal dengan Dewan Siasat Militer (Rosidi, 1986:106).

Dewan Siasat Militer adalah suatu instansi yang merumuskan garis-garis besar mengenai sikap, pendirian dan tindakan-tindakan Republik Indonesia, apabila Belanda menyerang Republik Indonesia. Salah satu sikap, pendirian dan tindakan-tindakan yang dilakukan Dewan Siasat Militer antara lain : Tempat Pimpinan negara Republik Indonesia untuk bidang luar negeri ditetapkan di India, Pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia ditetapkan di Sumatera dan di Jawa, pemerintahan pusat akan ikut bergriya. Dipihak militer telah menyiapkan rencana membagi kesatuan-kesatuan militer dalam tiga bentuk kesatuan yakni :

Kesatuan yang berada didaerah-daerah seperti Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Kediri, Palembang, Sumatera barat, Tapanuli, Aceh, untuk mengadakan bumi-hangus apabila Belanda menyerang Republik Indonesia serta mengadakan perang gerilya.

Pasukan yang berasal dari daerah-daerah disusun dalam suatu unit untuk dijadikan suatu pasukan apabila Belanda benar-benar menyerang Republik Indonesia.

Laskar-laskar rakyat segera diorganisir untuk menghadapi apabila Belanda benar-benar menyerang serta laskar-laskar rakyat segera dapat diinfiltrasikan kedaerah-daerah (Nasution, 1966:121).

Pembicaraan dalam dewan siasat militer juga membahas mengenai pemindahan kedudukan pemerintahan ke Sumatera apabila Belanda melancarkan agresi militernya. Pulau Sumatera dijadikan tempat pemerintahan dikarenakan agresi militer Belanda diperkirakan akan menyerang dan menguasai pulau Jawa. Oleh karena itu dipilihlah pulau Sumatera karena wilayahnya yang luas serta sebagian besar wilayahnya masih merupakan hutan rimba yang daerahnya cocok apabila diadakan perang gerilya. Selain itu daerah Sumatera yang terletak wilayah barat Republik Indonesia sehingga

memudahkan hubungan dengan luar negeri. Pemerintahan pada waktu itu membuat gagasan untuk membagi perjuangan, Presiden Sukarno disertai oleh wakil-wakil Republik Indonesia di PBB dan India akan memimpin perjuangan diplomasi ke luar negeri untuk Wakil Presiden Moh Hatta akan memimpin perjuangan politik dari suatu tempat di Sumatera sedangkan beberapa menteri dan pimpinan angkatan perang akan tetap berada di pulau Jawa (Rosidi, 1986, 107).

Bulan November 1948 Moh Hatta menerima telegram dari Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera, Mr T.M Hasan untuk datang ke Bukittinggi guna meleraikan persengketaan antara Mayor Bedjo dengan Mayor Malau di Tapanuli. Persengketaan antara Mayor Bedjo dengan Mayor Malau dipicu adanya hasutan dari Belanda mengenai pembentukan negara batak raya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dari Tapanuli dan Sumatera Timur. Dengan adanya berita tersebut maka disepakati oleh Mayor Bedjo dan Mayor Malau untuk menangkap para tokoh-tokoh yang dianggap terlibat. Namun dalam penangkapan yang dipimpin oleh Kapten Payung Bangun terjadi pertempuran dengan pasukan Kapten Koima Hasibuan. Peristiwa gugurnya Kapten Koima Hasibuan didengar oleh Mayor Bedjo yang segera bertindak untuk menemui Kapten Payung Bangun untuk meminta tawanan yang telah ditawan. Setelah diperiksa ternyata banyak tawanan yang dinyatakan tidak bersalah kemudian dilepaskan. Hal inilah yang memicu kemarahan Mayor Malau yang berlanjut dengan adanya pertikaian senjata.

Keberangkatan Moh Hatta ke Sumatera selain meleraikan persengketaan akan menempatkan A.E Kawilarang sebagai panglima Sumatera Utara serta mempersiapkan Sumatera sebagai pusat pemerintahan apabila Belanda melancarkan agresi militernya. Moh Hatta berangkat ke Bukittinggi beserta Wangsa Widjaya sebagai sekretaris wakil presiden dan ajudan Batanghari, Kolonel Hidayat dan pembantunya Letnan Akil, Sjafruddin Prawiranegara, Lukman Hakim, Rusli Rahim. Sjafruddin Prawiranegara disiapkan oleh Moh. Hatta menjadi perdana menteri sementara apabila terjadi agresi militer Belanda (Hatta, 2011:185).

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti dalam penelitian ini berusaha memaparkan mengenai fakta pembentukan PDRI pada tahun 1948. Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas PDRI memang sudah banyak, apalagi yang menyatakan bahwa PDRI dibentuk oleh Sjafrudin Prawiranegara. Dalam penelitian

ini peneliti tidak menyangkal bahwa PDRI memang dibentuk oleh Sjafruddin Prawiranegara. Akan tetapi mengenai inisiatif pembentukan PDRI tidak muncul begitu saja, hal ini bisa dilihat dari penjelasan di atas bahwa mengenai pembentukan PDRI sudah direncanakan jauh sebelum Belanda melakukan agresi militernya. Melalui Dewan Siasat Militer, mengenai strategi pembentukan pemerintahan darurat sudah direncanakan dan bahkan tempat yang akan dijadikan pemerintahan darurat sudah dipersiapkan yaitu di Sumatera.

Penelitian-penelitian terdahulu banyak menyebutkan bahwa PDRI yang dibentuk di Halaban oleh Sjafruddin Prawiranegara merupakan atas inisiatif Sjafruddin Prawiranegara sendiri. Sjafruddin Prawiranegara dalam bukunya juga mengungkapkan bahwa mengenai pembentukan PDRI merupakan inisiatif dari Sjafruddin Prawiranegara (Prawiranegara, 1981:41). Namun, hal ini bertolak belakang dengan penjelasan yang dipaparkan oleh Sjafruddin Prawiranegara dalam buku (Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke-70, 1972:326), Sjafruddin Prawiranegara menjelaskan bahwa dengan membentuk PDRI berarti telah melaksanakan tugas sesuai dengan rencana. Apabila dilihat dari penjelasan di atas bahwa strategi pembentukan pemerintahan darurat direncanakan oleh Dewan Siasat Militer. Sjafruddin Prawiranegara membentuk PDRI memang secara mental sudah dipersiapkan. Hal ini juga selaras seperti yang dikatakan Moh. Roem (Loebis, 1995:314) yang menjelaskan bahwa soal pembentukan pimpinan perjuangan di Sumatera, jika Yogyakarta jatuh sudah banyak dibicarakan di kalangan pemimpin-pemimpin Republik Indonesia.

Penjelasan mengenai Sjafruddin Prawiranegara yang membentuk PDRI juga merupakan strategi pemimpin-pemimpin Republik Indonesia, Sjafruddin Prawiranegara disiapkan oleh Moh. Hatta sebagai perdana menteri sementara apabila pemerintahan Republik Indonesia tidak dapat menjalankan tugasnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mengenai pembentukan PDRI pada tahun 1948 juga mengenai Sjafruddin Prawiranegara yang diangkat sebagai ketua PDRI merupakan strategi dari pemimpin-pemimpin Republik Indonesia pada saat itu yang mampu membaca situasi perjuangan. Penunjukan Sjafruddin Prawiranegara sebagai ketua PDRI hal ini dikarenakan Sjafruddin Prawiranegara merupakan salah satu dari menteri kabinet M. Hatta dan memiliki jabatan paling tinggi pada

saat rapat pembentukan PDRI. Peranan dwitunggal pemimpin Republik Indonesia yaitu Sukarno dan M. Hatta dalam merancang strategi pengalihan kekuasaan serta penunjukan Sjafruddin Prawiranegara menjadi sangat sentral bagi perjuangan Republik Indonesia dalam usahanya mempertahankan kemerdekaan. Pemilihan Sumatera sebagai tempat pemerintahan darurat serta penunjukan Sjafruddin Prawiranegara sebagai perdana menteri sementara merupakan strategi yang tepat. Penunjukan Sjafruddin Prawiranegara sebagai perdana Menteri sementara dikarenakan dianggap cocok untuk menyatukan perjuangan rakyat Sumatera yang mayoritas agama Islam. Selain itu kedudukan Sjafruddin Prawiranegara sebagai menteri kemakmuran juga berpengaruh untuk menata kemakmuran perekonomian rakyat Sumatera.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti beranggapan bahwa pembentukan PDRI merupakan suatu strategi dari para founding father Republik Indonesia dalam usahanya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang ada mengenai rencana pembentukan PDRI yang dimulai dari pembicaraan dalam Dewan Siasat Militer maupun dari kesaksian Moh. Hatta. Oleh karena itu terciptalah realitas obyektif mengenai pembentukan PDRI. Namun, Sjafruddin Prawiranegara merupakan seorang tokoh yang mempunyai kegigihan dalam membentuk hingga menjalankan pemerintahan PDRI.

Sjafruddin Prawiranegara dipersiapkan menjadi Perdana menteri sementara oleh Moh. Hatta bukan tanpa alasan. Sjafruddin Prawiranegara dipilih karena secara latar belakang Agama mempunyai dasar yang kuat untuk menyatukan perjuangan rakyat Sumatera yang sebagian besar merupakan pemeluk agama Islam untuk melawan Belanda apabila pemerintahan darurat dibentuk. Sjafruddin Prawiranegara merupakan keturunan kesultanan Banten yang diperolehnya dari ibu, sedangkan sang ayah merupakan bangsawan dari Minangkabau yaitu Soetan Alamintan yang ikut mengobarkan perang Padri (1821-1937) (Rosidi, 1986:2). Selain itu Sjafruddin Prawiranegara merupakan seorang ahli Hukum yang bergelar Meester in de Rechten lulusan RHS (Rechts Hoge School) yang merupakan sekolah tinggi hukum yang berada di Jakarta. Oleh karena itu Sjafruddin dipilih menjadi perdana menteri sementara karena memang secara keahlian personal dapat menjalankan pemerintahan

darurat, serta mengetahui tentang ketatanegaraan yang bersifat darurat juga mengenai hukum-hukum berdirinya sebuah pemerintahan darurat.

c. Taktik PDRI dalam Mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1948-1949.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan atau sering disebut dengan Perang Kemerdekaan, bangsa Indonesia memakai dua strategi dalam menghadapi usaha Belanda yang hendak menguasai Indonesia, yaitu lewat perjuangan bersenjata dan diplomasi. Kedua cara perjuangan ini dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia terbukti sangat efektif dan saling mengisi. Taktik perjuangan PDRI salah satunya adalah dengan membentuk komisariat pemerintahan. Keberadaan PDRI diakui oleh petinggi militer yang berada di Jawa. Menteri-Menteri yang berada di Jawa dan tidak tertangkap Belanda juga mengakui keberadaan PDRI. Dengan adanya para Menteri-Menteri yang selamat dari penangkapan Belanda maka segera dibentuk Komisariat Pemerintah Pusat Djawa (KPPD) yang diketuai oleh J. Kasimo, dengan anggota-anggotanya terdiri dari Mr. Susanto Tirtoprojo, Supeno, Kiai Mansyur dan Panji Suroso (Rasjid, 1984:21). Hal ini dilakukan agar tidak terdapat dualisme dalam pemerintahan antara di Jawa dan Sumatera.

Sejak hubungan PDRI dan Jawa dapat dilakukan, informasi-informasi perkembangan di Jawa terus-menerus dilaporkan kepada PDRI di Sumatera melalui pemancar radio dan telegram. Sesudah PDRI dibentuk pada tanggal 22 Desember 1948, langkah pertama yang dilakukan oleh PDRI melalui menteri keamanan Mr. S.M. Rasjid yang juga sebagai Ketua Dewan Pertahanan Daerah (DPD) Sumatera Barat membentuk Komando Militer di daerah Sumatera Barat. Dalam usahanya menggalang dukungan masyarakat internasional, perwakilan Republik Indonesia yang berada di New Delhi, India melalui Soedarsono banyak melontarkan berita-berita mengenai kecaman terhadap agresi Belanda terhadap Republik Indonesia. Perjuangan untuk memperoleh dukungan dari dunia internasional tidak hanya dilakukan di luar negeri saja, namun juga diadakan di dalam negeri dengan mengadakan suatu gerakan serangan umum 1 Maret 1949.

d. Pengembalian Mandat

Setelah campur tangan Dewan Keamanan PBB Belanda memilih berunding dengan Moh. Roem sebagai delegasi Republik Indonesia dan Belanda diwakili oleh Van Royen. Perundingan itu menghasilkan Perjanjian Roem-Royen. ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Perundingan yang dilakukan oleh Republik Indonesia dengan Belanda, menimbulkan reaksi dari para pemimpin PDRI yang berada di dua tempat yaitu Bidar Alam dan Kototinggi. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan akan diadakannya pertemuan antara ketua PDRI, Sjafruddin Prawiranegara yang berada di Bidar Alam dengan Mr. M. Rasjid di Kototinggi untuk membicarakan sikap politik PDRI terhadap rencana perundingan yang dilakukan Republik Indonesia dengan Belanda. Dalam pertemuan tersebut memnag terdapat peselisihan. Namun, Sjafruddin Prawiranegara menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan mandat kembali kepada Sukarno dan Moh. Hatta demi mencegah perpecahan dan menjaga serta memelihara persatuan.

Setelah tiba di Bangka, Moh. Hatta segera membentuk sebuah delegasi yang akan dikirim untuk menemui PDRI. Delegasi tersebut terdiri dari Dr. Leimena, Moh Natsir, Dr. Halim dan Agus djamal sebagai sekertaris delegasi. Untuk menghadapi delegasi Moh. Hatta, maka pada tanggal 1 Juli 1949 diselenggarakan penyambutan terhadap delegasi yang akan datang. Pembicaraan dalam rapat membahas mengenai langkah-langkah yang diambil pemimpin Republik Indonesia namun akhirnya tercapai kesepakatan untuk menerima delegasi Moh. Hatta (Rosidi, 1986:128). Pada tanggal 6 Juli 1949 berlangsung pertemuan antara PDRI dengan delegasi Moh. Hatta di Koto Kociak, Talago, Payakumbuh. Dalam pertemuan tersebut delegasi Moh. Hatta mempunyai tujuan untuk meyakinkan Mr. Sjarifuddin Prawiranegara bahwa inisiatif yang diambil Pemimpin Republik Indonesia merupakan hasil maksimal yang dapat dilakukan pemerintah pada waktu itu. Diharapkan Sjafruddin Prawiranegara dapat menerima keputusan itu serta dengan demikian bersedia kembali ke Yogyakarta (Wild dan Carey Eds, 1986:202).

Perundingan dengan delegasi Moh. Hatta, akhirnya ketua Sjafruddin Prawiranegara bersedia kembali ke Yogyakarta dengan memberikan tiga syarat: (1) TNI tetap berada di daerah Republik Indonesia yang diduduki semula; (2) tentara Belanda harus ditarik dari

daerah yang didudukinya; (3) pemulihan pemerintah Rpublik Indonesia di Yogyakarta harus dilakukan tanpa syarat (zed, 1997:258). Dr. Leimena dan anggotanya amemberikan jaminan bahwa syarat yang diajukan Sjafruddin Prawiranegara akan dijadikan pernyataan resmi Republik Indonesia yang akan disampaikan dalam sidang BP-KNIP di Yogyakarta.

Setelah perundingan Sjafruddin Prawiranegara dengan delegasi Moh. Hatta mencapai kesepakatan, pada tanggal 9 Juli 1949 Sjafruddin Prawiranegara dan Loekman Hakim beserta rombongan delegasi Moh. Hatta terbang ke Jakarta. Pada tanggal 10 Juli 1949 rombongan meneruskan perjalanan terbang ke Yogyakarta. Rombongan disambut oleh Moh. Hatta, Sultan Hamengku Buwana IX, M. Roem, Mr. Tadjudin Noor, Ki Hadjar Dewantara, dan pembesar Republik Indonesia lainnya (Rosidi, 1986:129). Setelah Sjafruddin Prawiranegara tiba di Yogyakarta, Panglima Besar jendral Sudirman, dijemput oleh letnan Kolonel Soeharto.

Pada saat pemimpin yang hadir di Yogyakarta dianggap lengkap, maka pada tanggal 13 Juli 1949 diadakanlah sidang kabinet dibawah pimpinan Moh. Hatta. Dalam sidang tersebut Sjafruddin Prawiranegara selaku ketua PDRI menyampaikan laporan kepada Presiden Sukarno tentang hal-hal yang sudah dilakukan PDRI selama keberadaanya. Sjafruddin Prawiranegara dalam sidang tersebut tidak lagi mengecam kebijakan yang diambil pemerintah Republik Indonesia, hal ini dikarenakan Sjafruddin Prawiranegara melakukan tugas sesuai dengan rencana dan tujuan yang tulus ikhlas (Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke-70, 1972:326). Moh. Hatta juga menyampaikan pidatonya untuk menjelaskan kembali kebijakan politik yang ditempuh Republik Indonesia selama ini serta hasil-hasil yang telah dicapai. Di akhir sidang kabinet, Sjafruddin Prawiranegara menyerahkan mandat kepada Presiden Sukarno. Dengan demikian berakhirilah pemerintahan PDRI dalam usahanya melanjutkan eksistensi Republik Indonesia. Pada tanggal 25 Juli BP-KNIP menyelenggarakan sidang yang dipimpin oleh Mr. Assaat, dalam sidang tersebut menyetujui pernyataan Roem-Royen, tetapi dengan persyaratan yang telah diajukan Sjafruddin Prawiranegara sebelum kembali ke Yogyakarta (Sastroamidjojo, 1974:283).

PENUTUP

Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berdiri pada 22 Desember 1948 di

Sumatera Barat merupakan salah satu mata rantai sejarah bangsa Indonesia dalam memperjuangkan tegaknya proklamasi 17 Agustus 1945. PDRI yang lahir menyusul ditangkapnya Sukarno dan Moh. Hatta serta para pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta, tepat pada saat militer Belanda melancarkan agresi kedua pada 19 Desember 1948, menandai salah satu fase terpenting dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia menghadapi Belanda yang berkeinginan kuat menjajah kembali Indonesia. Sebagai sebuah pemerintahan darurat (emergency government), PDRI dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Mr. Syafrudin Prawiranegara, yang membentuk pemerintahan darurat setelah Presiden Soekarno memberikan mandat kepadanya lewat surat telegram tetapi tidak pernah sampai ke tangannya. Bersama sejumlah tokoh Republik Indonesia di Sumatera Barat, seperti Tengku Mohammad Hassan, Soetan Mohammad Rasjid, dan lain-lain, PDRI mampu bertahan bahkan mampu memperkuat kedudukannya di mata dunia internasional.

Tindakan agresi militer Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 yang menguasai Yogyakarta dan Bukittinggi serta menahan para pemimpin Republik Indonesia. Hal inilah yang melatarbelakangi terbentuknya PDRI di Halaban pada tanggal 22 Desember 1948. Pembentukan PDRI yang dibentuk oleh Sjafruddin Prawiranegara merupakan sebuah strategi dari para pemimpin-pemimpin Republik Indonesia untuk mengalihkan kekuasaan disuatu tempat di Sumatra. Oleh karena itu melalui Dewan Siasat militer, pembentukan PDRI telah direncanakan oleh para pemimpin Republik Indonesia apabila Belanda melakukan serangan terhadap Republik Indonesia.

PDRI beserta susunannya yang telah dibentuk pada tanggal 22 Desember 1948 di Halaban segera melakukan taktik dalam menghadapi pasukan Belanda yang mulai menguasai Bukittinggi. taktik PDRI tersebut dibagi menjadi dua cara yang Pertama adalah taktik perang. Taktik perang yang dilakukan PDRI untuk menghadapi Belanda yaitu dengan membentuk komisariat pemerintahan di Sumatera maupun di Jawa. Untuk mempermudah pengorganisasian di bidang militer dibentuklah komanda militer dengan menunjuk para perangkat desa, kecamatan kabupaten untuk menjalankan pemerintahan militer dibawah gubernur militer. Kedua adalah usaha diplomasi, diplomasi yang dilakukan perwakilan PDRI di luar negeri untuk

membangun dukungan masyarakat internasional adalah dengan menyuarakan tindakan agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia serta perjuangan yang dilakukan rakyat Indonesia dan TNI ke sidang-sidang PBB serta konferensi New Delhi guna mengecam tindakan Belanda. Usaha membangun dukungan masyarakat internasional tidak hanya dikukan oleh para perwakilan-perwakilan Republik Indonesia. Akan tetapi juga dilakukan oleh TNI dengan melakukan serangan-serangan terhadap Belanda. Salah satunya adalah serangan umum 1 Maret 1949, meskipun serangan tersebut hanya mampu merebut dan menguasai Yogyakarta selama 6 jam, tetapi serangan tersebut cukup menunjukan kepada dunia internasional dan Security Council bahwa perjuangan Republik Indonesia masih ada.

Banyaknya desakan terhadap Belanda atas agresinya terhadap Republik Indonesia melalui sidang-sidang Dewan Keamanan PBB. Maka Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949 untuk menyelesaikan persengketaan antara Belanda dengan Republik Indonesia. Dengan banyaknya desakan negara-negara yang mendukung Resolusi Dewan Keamanan PBB, maka Belanda bersedia melakukan perundingan dengan Republik Indonesia. Dengan bantuan UNCI perundingan antara Belanda dan Republik Indonesia dapat dilaksanakan. Belanda yang diwakili oleh Van Royen dan Republik Indonesia diwakili oleh Moh. Roem, maka dilaksanakanlah perjanjian antara Belanda dengan Republik Indonesia pada tanggal 7 Mei 1949 yang dikenal dengan Royen-Roem Statement. Pernyataan Roem-Royen yang menyetujui dikembalikannya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Maka PDRI pada tanggal 13 Juli 1949 mengembalikan mandat kepada presiden Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. 2011. Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Jakarta : Yayasan Bung Karno.
- Agung, I. A. A.G. 1983. Renville. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan..
- Agung, I. A. A.G. 1995. Persetujuan Linggajati, Prolog dan Epilog. Yogyakarta : Pustaka Nusatama.
- Asnan, G. 2006. Pemerintah Sumatera Barat dari VOC Hingga Revormasi. Yogyakarta : Citra Pustaka.

- Cipta Adi Pustaka. 1990. Ensiklopedi Nasional Indonesia. Jakarta : PT Cipta Adi Pustaka.
- Edisaputra. 1987. Sumatera Dalam Perang Kemerdekaan, Perlawanan Rakyat Semesta Menentang Jepang, Inggris dan Belanda. Jakarta : Yayasan Bina Satria 45.
- Gottschalk, L. 1969. Mengerti Sejarah. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. 1986. Jakarta : UI Press.
- Hatta, M. 2011. Untuk Negeriku : Sebuah Otobiografi. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Heijboer, P. 1998. Agresi Militer Belanda, Memperebutkan Pending Zamrud Sepanjang Khatulistiwa 1945-1949. Jakarta : PT Grasindo.
- Husein, A., Dkk. 1992. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I. di Minangkabau/Riau 1945-1950. Minangkabau : Badan Pemurnian Sejarah Indonesia (BPSIM).
- Isa, T.M. 1996. Teuku Mohammad Ali Panglima Polim : Sumbangsih Aceh Bagi Republik. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Kahin, G. M. T. 1952. Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik : Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Terjemahan oleh Nin Bakdi Soemanto. 1995. Solo : UNS Press.
- Kuntowijoyo. 1995. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta : Bentang.
- Lembaga Analisa Informasi. 2005. Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949. Yogyakarta : Media Presindo.
- Loebis, A. B. 1995. Kilas Balik Revolusi : Kenangan, Pelaku dan Saksi. Jakarta : UI Press.
- Moehadi, 1981. Riwayat Singkat Pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Semarang : CV Aneka.
- Nasikun. 1984. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta : CV Rajawali.
- Nasution, A. H. 1966. Sedjarah Perjuangan Nasional Dibidang Bersedjata. Jakarta : Mega Bookstore.
- Nasution, A. H. 1979. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 9 : Agresi Militer Belanda II. Bandung : Angkasa.
- Nasution, A. H. 1979. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 10 : Perang Gerilya Semesta II. Bandung : Angkasa.
- Nasution, A. H. 1984. Pokok-Pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa yang Lalu dan Akan Datang. Bandung : Angkasa.
- Noor, U.S. 1999. Peran Stasiun Radio PHB AURI Selama Perang Kemerdekaan RI II 1948-1949. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Notosusanto, N dan Poesponegoro, M. D. 2009. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Notosusanto, N. 1971. Norma-Norma Penelitian dan Penulisan Sejarah. Departemen Pertahanan Keamanan : Pusat Sejarah ABRI.
- Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta Ke-70. 1972. Bung Hatta Mengabdikan pada Tjita-Tjita Perjuangan Bangsa. Jakarta : Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta Ke-70.
- Pour, J. 2009. Doorstoot Naar Djokja : Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Purwoko, Dwi. 1995. Dr. Mr. T. H. Moehammad Hasan : Salah Seorang Pendiri Republik Indonesia dan Pemimpin bangsa. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Prawiranegara, S. 1981. Sejarah Sebagai Pedoman Untuk Membangun Masa Depan. Jakarta : Yayasan Idayu.
- Rasjid, S. M. 1984. Di Sekitar PDRI : Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Jakarta : Bulan Bintang.
- Roem, M. 1977. Bunga Rampai Dari Sejarah II. Jakarta : Bulan Bintang.
- Roem, M. 1977. Suka Duka Berunding Dengan Belanda. Jakarta : Idayu Press.
- Rosidi, A. 1986. Sjafrudin Prawiranegara lebih Takut Kepada Allah SWT. Jakarta : Yayasan Idayu.

- Salim, I. 1995. Terobosan PDRI dan Peranan TNI. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sardjono, V dan Marsadji, G.L. 1982. Pemerintah Darurat Republik Indonesia : Penyelamat Negara dan Bangsa Indonesia. Jakarta : Tintamas.
- Sastroamidjojo, A. 1974. Tonggak-tonggak di Perjalananku. Jakarta : PT. Kinta.
- Seskoed. 1989. Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta Latar Belakang dan Pengaruhnya. Jakarta : PT. Citra Lamtoro Gung Persada.
- Simatupang, T. B. 1961. Laporan Dari Banaran : Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan. Jakarta : Sinar Harapan.
- Sjamsudin, H. 2007. Metodologi penelitian Sejarah. Yogyakarta : Ombak.
- Soetanto, H. 2006. Yogyakarta 19 Desember 1948, Jendral Spoor (Operatie Kraai) versus Jendral Sudirman (Perintah siasat No. 1). Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Surbakti, R. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : Grasindo.
- Surjomihardjo, A dan Chaniago, J.R (Eds). 1990. PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) Dikaji Ulang. Jakarta : MSI
- Tjokropranolo. 1992. Panglima Besar TNI Jendral Soedirman Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajah di Indonesia : Kisah Seorang Pangawal. Jakarta: PT. Surya Pesindo.
- Tobing, K. M. L. 1987. Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville Jakarta : CV. Haji Masagung.
- Tobing, K. M. L. 1987. Perjuangan Politik Bangsa Indonesia K.M.B. Jakarta : CV. Haji Masagung.
- Universitas Jember. 2011. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember : Jember University Press.
- Van de Velde, J. J. 1987. Surat-Surat dari Sumatera 1928-1949. Terjemahan oleh Redaksi Pustaka Azet. Jakarta : Pustaka Azet
- Wild, C. dan Carey, P. (Eds). 1986. Gelora Api Revolusi : Sebuah Antologi Sejarah. Jakarta : PT. Gramedia.
- Zed, M. 1997. Somewhere in The Jungle : Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan. Jakarta : Grafiti
- Zed, M., Utama, E., dan Chaniago, H. 1998. Sumatra Barat di Panggung Sejarah 1945-1995. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.